

2023

RENCANA KERJA



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI BARAT



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Alamat: Jl. K.H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas-Mamuju
Telp/Fax (0426) 2321848 Kode Pos 91511 Mamuju

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 1600.00/160/VIII/2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis harus di terjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.
- Mengingat :
- a) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - e) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - j) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- m) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025;
- n) Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 – 2026
- o) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- p) Peraturan Gubernur No 45 tahun 2016 tentang kedudukan tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah provinsi Sulawesi Barat.
- q) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Dokumen RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, Dokumen Renstra OPD Tahun 2023-2026, Arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023, RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 dan arah kebijakan pembangunan Nasional Tahun 2023.
- Ketiga : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada poin KESATU berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.
- Keempat : Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023, meliputi :
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu
 - Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - Bab V : Penutup
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju
pada tanggal : 3 Agustus 2022

KEPALA DINAS,



A. ACO TAKDIR, S.Sos. M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19670702 199103 1 011

Tembusan : kepada Yth;

1. Gubernur Sulawesi Barat (sebagai laporan) di Mamuju
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
3. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
4. Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
5. Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
6. Arsip.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang berpedoman pada Renstra OPD dan RKPD, dimana isi dokumen tersebut merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi OPD. Penyusunan renja OPD mengakomodasi hasil forum multistakeholder OPD dan menjadi masukan utama bagi penyusunan RKPD, RKA OPD, KUA, PPAS dan RAPBD. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Tujuan, Sasaran dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2022.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Yang disusun oleh Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD.

Prinsip-prinsip penyusunan Renja OPD berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD. Penyusunan Renja OPD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Substansi rancangan Renja OPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan OPD terhadap Renstra OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, dana indikator serta sumber dananya. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Tahapan penyusunan rancangan Renja OPD mencakup persiapan penyusunan rancangan, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan OPD, review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan

Renstra OPD, penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, penelaahan rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan masyarakat dan perumusan kegiatan prioritas. Dalam penyusunan Renja 2023 berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, Dokumen Renstra OPD Tahun 2023-2026, Arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023, RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 dan arah kebijakan pembangunan Nasional Tahun 2023. Tema arah kebijakan prioritas pembangunan Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Barat, yaitu : Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. Pada penyusunan Renja Tahun 2023 Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden No.61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
 14. Peraturan Presiden No.71 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005 – 2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014 – 2034;
31. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan KeTiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
32. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja OPD Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi unit kerja dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan. Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 adalah :

- a. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2023 yang mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

- b. Merupakan kerangka acuan dalam menentukan program dan kegiatan Dinas Lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.
- c. Untuk lebih terarah dan terukurnya kinerja program sesuai dengan target yang ingin dicapai pada Tahun 2023.
- d. Merupakan pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisikan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran RENJA OPD, program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil keluaran pada sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Dalam rangka mengukur kinerja, indikator yang digunakan adalah indikator sasaran strategis dan indikator kegiatan 2021. Indikator Kinerja sasaran strategis adalah yang menggambarkan tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja. Indikator Kinerja kegiatan terdiri dari indikator input, output dan outcome untuk setiap kegiatan. Selanjutnya setiap indikator kinerja ditetapkan satuan, rencana dan realisasinya. Dari perbandingan antara rencana dan realisasi tersebut dihasilkan capaian kinerja.

Rencana kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan atau implementasi rencana kerja tersebut. Rencana kerja (Renja OPD) tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan Kegiatan.

Adapun Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sebesar Rp. 8.290.048.493,- dengan tingkat realisasi capaian kinerja keuangan sampai dengan triwulan IV Tahun 2021 sebesar Rp. 8.155.968.200,- dengan persentase sebesar 98.38 %.

Dari hasil evaluasi kinerja Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat pada Pada Tahun 2021 terdapat kegiatan dengan capaian kinerja yang masih rendah atau kurang, beberapa hal yang masih kurang disebabkan karena:

1. Adanya rasionalisasi anggaran dan refofusing anggaran pada Tahun 2021 mengakibatkan capaian kinerja kegiatan pada Tahun 2021 beberapa target tidak tercapai.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi pendidikan teknis lingkungan yang belum memadai.
3. Sarana dan prasarana lingkungan belum memadai.

Kondisi tersebut berimplikasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 yang ditargetkan 100% di bulan Desember 2021 tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Untuk mengantisipasi capaian target kinerja program dan kegiatan Tahun anggaran 2021, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat mengambil kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), melalui diklat teknis dan diklat formal yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan SDM.
2. Penegasan pelaksanaan SOP bagi pegawai struktural dan teknis untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat.
3. Membangun komunikasi dan Koordinasi yang intensif dengan Kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangan.
4. Membuat Rencana Aksi pelaksanaan program/kegiatan/Subkegiatan tahun anggaran 2021.

Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 pada Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2021
TRIMULAN IV
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

P

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan TRKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket				
					6		7		8		9		10		11		12		13=127x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
Sema Bidang																										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					5.842.480,425		686.052,073		1.944.149,807		1.512.192,409		1.577.669,321		5.720.063,610		97,90%		5.720.063,610		0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	0,00	0,00	24	-	-	-	-	24	-	-	24	24	24	100,00%	100,00%	24,00	24,00	0,00%	0,00%				
			Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	0,00	0,00	20	-	-	-	-	20	-	-	20	20	20	100,00%	100,00%	20,00	20,00	0,00%	0,00%				
			Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	0,00	0,00	12	154.824,720	-	-	58.322,000	48.358,720	-	-	12	48.144,000	12	154.824,720	100,00%	100,00%	12,00	12,00	0,00%	0,00%			
			Nilai Evaluasi Internal Lingkup SKPD (Poin)	0,00	0,00	8	-	-	-	-	8	-	-	8	8	8	100,00%	100,00%	8,00	8,00	0,00%	0,00%				
			Nilai Capaian Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	0,00	0,00	16	-	-	-	-	16	-	-	16	16	16	100,00%	100,00%	16,00	16,00	0,00%	0,00%				
			Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup SKPD (Poin)	0,00	0,00	100	-	-	-	-	100	-	-	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00	100,00	0,00%	0,00%				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	0,00	0,00	4	45.911,220	1	-	3	13.550,000	4	17.911,220	4	14.450,000	4	45.911,220	100,00%	100,00%	4,00	4,00	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun (Laporan)	0,00	0,00	2	71.267,500	1	-	1	34.972,000	1	15.751,500	2	20.544,000	2	71.267,500	100,00%	100,00%	2,00	2,00	0,00%	0,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	0,00	0,00	4	37.646,000	3	-	3	9.800,000	4	14.696,000	4	13.150,000	4	37.646,000	100,00%	100,00%	4,00	4,00	0,00%	0,00%			
			Jumlah Data Sektoral yang Tersedia (Item)	0,00	0,00	12	-	-	-	-	12	-	-	12	12	12	100,00%	100,00%	12,00	12,00	0,00%	0,00%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD (Persen)	0,00	0,00	90	-	-	-	-	98	-	-	98	98	4.698.519,326	109,31%	97,54%	98,38	98,38	0,00%	0,00%				
			Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup OPD (Persen)	0,00	0,00	95	4.816.870,285	-	686.052,073	-	1.653.133,653	-	1.197.513,254	98	1.161.820,346	98	4.698.519,326	103,56%	97,54%	98,38	98,38	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan (Orang)	0,00	0,00	156	4.777.365,285	156	686.052,073	156	1.643.333,653	156	1.181.408,254	156	1.148.220,346	156	4.659.014,326	100,00%	97,52%	156,00	156,00	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun (Laporan)	0,00	0,00	1	39.505,000	-	-	-	9.800,000	-	16.105,000	1	13.600,000	1	39.505,000	100,00%	100,00%	1,00	1,00	0,00%	0,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup OPD (Persen)	0,00	0,00	100	-	-	-	-	100	-	-	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00	100,00	0,00%	0,00%				
			Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Lingkup SKPD (Persen)	0,00	0,00	100	21.816,000	-	-	-	12.266,500	-	-	100	9.000,000	100	21.266,500	100,00%	97,48%	100,00	100,00	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	0,00	8	21.816,000	-	-	1	12.266,500	5	-	8	9.000,000	8	21.266,500	100,00%	97,48%	8,00	8,00	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)	0,00	0,00	95	373.709,302	-	-	-	79.970,720	-	137.224,390	95	156.315,415	95	373.510,525	100,00%	99,95%	95,00	95,00	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Jenis)	0,00	0,00	10	26.897,000	-	-	4	800,000	7	16.312,450	10	9.784,550	10	26.897,000	100,00%	100,00%	10,00	10,00	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang yang Dicetak dan Digandakan (Jenis)	0,00	0,00	2	1.770,900	-	-	-	443,000	1	132,000	2	1.195,900	2	1.770,900	100,00%	100,00%	2,00	2,00	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Jenis)	0,00	0,00	1	5.066,000	-	-	-	-	-	-	1	5.066,000	1	5.066,000	100,00%	100,00%	1,00	1,00	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan (Jenis)	0,00	0,00	36	38.900,740	9	-	18	12.776,940	27	8.780,440	36	17.343,360	36	38.900,740	100,00%	100,00%	36,00	36,00	0,00%	0,00%			

2.2. CAPAIAN RENSTRA OPD

Renstra OPD merupakan landasan kebijakan strategi lima tahunan di bidang lingkungan hidup dalam kerangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Periode 2017-2022, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun serta menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan.

Tabel evaluasi capaian RENSTRA OPD 2017-2022 pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Tabel evaluasi capaian RENSTRA OPD 2017-2022

PROVINSI SULAWESI BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI BARAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2019(TAHUN n-3)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RPKD TAHUN BERJALAN 2022 (TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET RPKD TAHUN 2020 (TAHUN n-2)	REALISASI RPKD TAHUN 2021 (TAHUN n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2022 (THN BERJALAN/n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	90	90	90	90	90	90	90	Dinas Lingkungan Hidup	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah orang perjalanan yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah	100	Op	12 Bulan, 40 OP	20 OP	20 OP	100%	20 OP	12 Bulan, 80 OP	80	Dinas Lingkungan Hidup
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah orang perjalanan yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar daerah	100	Op	12 Bulan, 40 OP	20 OP	20 OP	100%	20 OP	12 Bulan, 80 OP	80	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang terbeli	35	Jenis	12 Bulan, 16 Jenis	9 jenis	0	100%	0	12 Bulan, 16Jenis	45.71	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang terbeli	235	Jenis	12 Bulan, 94 Jenis	47 Jenis	47 Jenis	100%	47 Jenis	12 Bulan, 188 Jenis	80	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terbeli	10	Bahan Bacaan	12 Bulan, 7 Bahan Bacaan	5 Bahan Bacaan	0 Bahan Bacaan	0%	2 Bahan Bacaan	12 Bulan, 9 Bahan Bacaan	90	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terbeli	35	Jenis	12 Bulan, 12 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	0	12 Bulan, 17 Jenis	48.57	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Terbayarkan	180	Rekening/ Bulan	12 Bulan, 72 Rekening/Bulan	36 Rekening/Bula	36 Rekening/Bula	100%	36 Rekening/Bulan	12 Bulan, 144 Rekening Bulan	80	Dinas Lingkungan
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bahan makan minum yang terbeli	25	Jenis	12 Bulan, 5 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	8 Jenis	12 Bulan, 19 Jenis	64	Dinas Lingkungan
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan yang terbeli	25	Jenis	12 Bulan, 5 Jenis	0	0	0%	0	12 Bulan, 5 Jenis	20	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetak dan Penggandaan yang tersedia	72	Bulan	36	12	12	100%	12	60	83.33	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Terkirim	72	Bulan	36	12	12	100%	12	60	83.33	Dinas Lingkungan
	Rata rata capaian kinerja						82%			68.63		
	Predikat Kinerja						T			R		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2019(TAHUN n-3)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RPKD TAHUN BERJALAN 2022 (TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET RPKD TAHUN 2020 (TAHUN n-2)	REALISASI RPKD TAHUN 2021 (TAHUN n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2022 (THN BERJALAN/n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	90	90	90	90	90	90	90	90	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terbeli	9 Unit	0	0	0	0%	3	3	33.33	Dinas Lingkungan Hidup	
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubeleur Kantor dan Laboratorium yang terbeli	40 Unit	12 Bulan, 10 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	12 Bulan, 16 Unit	30	Dinas Lingkungan Hidup	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	90 Unit	30	15	15	100%	6	51	56.67	Dinas Lingkungan Hidup	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	72 Bulan	36	12	12	100%	12	60	83.33	Dinas Lingkungan Hidup	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan operasional dan mobil jabatan yang terpelihara	36 unit	18	6	6	100%	6	30	83.33	Dinas Lingkungan Hidup	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor	jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Kantor terbeli	23 Unit	0	0	0	0	1	1	4.35	Dinas Lingkungan Hidup	
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	48 Bulan	12	12	12	100%	12	36	75.00	Dinas Lingkungan Hidup	
	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	72 Bulan	36	12	12	100%	12	60	83.33	Dinas Lingkungan Hidup	
	Rata rata capaian kinerja						75%			56.17		
	Predikat Kinerja						S			SR		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2019(TAHUN n-3)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RPKD TAHUN BERJALAN 2022 (TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET RPKD TAHUN 2020 (TAHUN n-2)	REALISASI RPKD TAHUN 2021 (TAHUN n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2022 (THN BERJALAN/n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021(%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta kelengkapannya yang terbeli	400	Pakaian	1 Paket, 80 Pakaian	0	0	0%	83	1 Paket, 163 Pakaian	40.75	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian hari-hari tertentu yang terbeli	400	Pakaian	80	83	83	100%	0	163	40.75	Dinas Lingkungan Hidup
	Rata rata capaian kinerja							50%			40.75	
	Predikat Kinerja							SR			SR	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumberdaya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya	100 %		90	90	90	90	90	90	90	Dinas Lingkungan Hidup
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkat Kapasitasnya	95	Ok	12 Bulan, 35 OK	200k	200k	100%	8 Ok	12 Bulan, 50 Ok	44.21	Dinas Lingkungan Hidup
	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Peraturan Perundang - undangan terbaru yang di sosialisasi	4	Peraturan Perundang -	1	0	0	0	1	2	50.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Rata rata capaian kinerja							50%			47.11	
	Predikat Kinerja							SR			SR	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Taat	Taat	Taat	Taat	Taat	Taat	Taat	Taat	Taat	Dinas Lingkungan Hidup
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD yang terlaksana	30	Kabupaten	1 Tahun, 12 Kabupaten	6 Kabupaten	6 Kabupaten	100%	6 Kabupaten	1 Tahun, 30 Kabupaten	83.33	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan RKA/DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA/DPA SKPD tersusun	11	Dokumen	5	2	2	100%	2	9	81.82	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen RENSTRA SKPD tersusun	2	Dokumen	1	0	0	0%	1	2	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan RKA-P/DPA-P SKPD	Jumlah dokumen RKA-P/DPA SKPD tersusun	11	Dokumen	5	2	2	100%	2	9	81.82	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun tersusun	5	laporan	2	1	1	100%	1	4	80	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2019(TAHUN n-3)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RPKD TAHUN BERJALAN 2022 (TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET RPKD TAHUN 2020 (TAHUN n-2)	REALISASI RPKD TAHUN 2021 (TAHUN n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2022 (THN BERJALAN/n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
	Forum SKPD	Jumlah program dan kegiatan yang disepakati sesuai Program/kegiatan Prioritas	350	Program/kegiatan	140	70	70	100%	70	280	80	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	20	Laporan	12 Bulan, 8 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12 Bulan, 20 Laporan	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	8	Dokumen	0	0	0	0%	1	1	12.5	Dinas Lingkungan Hidup
	Rata rata capaian kinerja							75%			77.43	
	Predikat Kinerja							S			R	
6	Program Pengelolaan dan Rehabilitas ekosistem pesisir dan laut	Peningkatan Indeks Tutupan Lahan	113.21	Ha	30.21	7.1	4	56%	2	36.21	31.98	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Luas lahan kritis wilayah pesisir dan Laut yang tertutupi dengan Tanaman Mangrove (Peningkatan Indeks Kualitas Lahan)	113.21	Ha	30.23	7.1	4	56%	2	36.23	32.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Inventarisasi data dan pembuatan peta kerusakan	1	Dokumen & Peta	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan
		Jumlah kelompok masyarakat pelestari lingkungan yang dibina	5	Kelompok masyarakat pelestari mangrove	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Rata rata capaian kinerja							56%			32.00	
	Predikat Kinerja							R			SR	
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah diwilayah Provinsi										
		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat										
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah dan TPA	Jumlah aparatur dan masyarakat yang Meningkatkan kapasitasnya dalam Pengelolaan Sampah dan TPA	400	Orang	200	50	50	100%	0	250	62.50	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Sampah yang dihasilkan	2	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Peserta HPSN	1000	Orang	400	200	200	100%	200	800	80	Dinas Lingkungan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2019(TAHUN n-3)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RPKD TAHUN BERJALAN 2022 (TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RPKD TAHUN 2020 (TAHUN n-2)	REALISASI RPKD TAHUN 2021 (TAHUN n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2022 (THN BERJALAN/n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	Sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan persampahan	Jumlah aparatur dan masyarakat yang terbina dalam pengelolaan sampah terpadu	210 OK	120	0	0	0	50	170	80.95	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Dokumen Inventarisasi dan pengawasan sampah terpadu	1 Dok	0	0	0	0	1	1	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan dan Pengembangan sarana prasana teknologi pengelolaan sampah	Jumlah Unit pengelolaan sampah	4 Unit	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan
	Rata rata capaian kinerja						40%			64.69	
	Predikat Kinerja						SR			SR	
9	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA									
		Terverifikasinya MHA dan Kearifan lokal pengetahuan tradisional Penetapan Hak MHA									
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan keterampilan									
	Pengembangan program sekolah peduli lingkungan (ADIWIYATA)	Jumlah Sekolah Sekolah Peduli Lingkungan	85 Sekolah	35	10	10	100%	15	60	70.59	Dinas Lingkungan
	Expose/Promosi upaya penanganan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Alam	Upaya penanganan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Alam yang di Expose/promosikan	10 Ekspose	2	2	2	100%	0	4	40	Dinas Lingkungan Hidup
	Saka Kalpataru	Jumlah kader lingkungan hidup yang aktif	16,225 kader lingkungan Hidup	4006	4006	40	1%	90	4136	25.49	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penilaian Kalpataru	50 Ok	0	0	0	0	25	25	50.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Kearifan Lokal Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen MHA yang di inventarisir	1 Dokumen	0	0	0	0	1	1	100.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
		Terverifikasinya MHA dan Kearifan lokal pengetahuan tradisional	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
		Penetapan Hak MHA	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	DLH
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan keterampilan	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Rata rata capaian kinerja						50%			71.52	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2019(TAHUN n-3)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RPKD TAHUN BERJALAN 2022 (TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET RPKD TAHUN 2020 (TAHUN n-2)	REALISASI RPKD TAHUN 2021 (TAHUN n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2022 (THN BERJALAN/n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021(%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
10	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan Indeks Tutupan Lahan										
		Laporan Inventarisasi GRK										
		Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi										
	Penyusunan Profil Kehati, Rencana Induk Pengelolaan Kehati dan Penentuan kawasan bernilai penting	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan pengelolaan Kehati daerah yang dihasilkan	4	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Dokumen Pemantauan Perlindungan sumber daya alam	2	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dan pengembangan sistem informasi kehati	Konservasi Kehati Daerah	6	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan
		Pengembangan sistem informasi kehati	10	kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan
	Pemantauan dan Pengawasan akses lahan terbuka akibat pertambangan serta pembuatan peta lahan	Jumlah Data kerusakan wilayah tambang	4	Dok	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan
	Penyusunan kriteria baku kerusakan lingkungan	Jumlah Penetapan kebijakan pengelolaan Sumber daya alam	5	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Gerakan Pembaharuan Sulbar Hijau (GPSH)	Penambahan Tutupan Lahan dengan Tanaman Produktif	35.4	Ha	35.4	0	0	0	0	35.4	100.00	Dinas Lingkungan
	Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	jumlah titik daerah tangkapan air	2200	Titik	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan
		jumlah titik konservasi tangkapan air dan sumber-sumber air	11	titik	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Laporan Inventarisasi GRK	5	Dokumen	2	1	1	100	1	4	80	DLH
	Pembinaan Program Kampung Iklim (ProKlim)	Jumlah Desa mandiri peduli lingkungan	35	Desa Peduli	8	3		100	7	18	51.43	Dinas Lingkungan
		Jumlah Komite Lingkungan Hidup	28	KomiteLingkungan	0	0		0	7	7	25.00	Dinas Lingkungan
	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah data GRK dan	1	Dokumen	2	1		0	0	1	100	DLH
	Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan untuk Pelestarian sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	109.4	Ha	47.67	1.5	1.5	100	2	51.17	46.77	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Dokumen Profil Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Dokumen kerusakan sumber-sumber	1	dokumen	1	0	0	0	0	1	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Rata rata capaian kinerja							60.00			55.64	
	Predikat Kinerja							R			SR	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2019(TAHUN n-3)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN 2022 (TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET RKPd TAHUN 2020 (TAHUN n-2)	REALISASI RKPd TAHUN 2021 (TAHUN n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2022 (THN BERJALAN/n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021(%)		
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
13	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Air											
		Peningkatan Indeks Kualitas Udara											
		Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas Kabupaten/kota yang ditangani											
		Jumlah Limbah B3 yang dikelola											
		Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi											
		Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi											
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup											
	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ADIPURA	Jumlah Kota yang dilakukan Pemantauan Adipura	20	Kab/Kota	16	4	4	100	0	20	100	Dinas Lingkungan	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan	Penghargaan Kalpataru Tk. Provinsi	1	kegiatan	1	0	0	0	0	1	100	Dinas Lingkungan	
	Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengendalian Lingkungan	Penghargaan kepada masyarakat	1000	Orang	200	200	200	100	200	600	60	Dinas Lingkungan	
	Pemantauan kualitas air sungai lintas kabupaten	Data Kualitas Air Sungai	20	Sungai	4	3	3	100	5	12	60	Dinas Lingkungan Hidup	
	Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Data Kualitas Udara	24	Kab	12	6	6	100	6	24	100	Dinas Lingkungan Hidup	
	Pemantauan Kualitas Air Laut	Data Kualitas Air laut	25	kab	5	0	0	0	5	10	40	Dinas Lingkungan Hidup	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2019(TAHUN n-3)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RPKD TAHUN BERJALAN 2022 (TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET RPKD TAHUN 2020 (TAHUN n-2)	REALISASI RPKD TAHUN 2021 (TAHUN n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2022 (THN BERJALAN/n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	Data Perusahaan dalam Mengelolah Lingkungan Hidup	46	Perusahaan	9	0	0	0	5	14	30.43	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan Pergub Tata Cara Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Jumlah dokumen Pergub Tata Cara Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Pengrusakan LH yang dihasilkan	2	Dokumen Pergub	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengelolaan Pos P3SLH	Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	56	Kasus lingkungan (Provinsi)	16	10	10	100	10	36	64.29	Dinas Lingkungan Hidup
	Sosialisasi tata cara pengaduan dan Pengelolaan Pengaduan LH	Jumlah SDM Aparatur, Stakeholders dan Masyarakat ditingkatkan kapasitas dan pengetahuannya dalam tata cara pengaduan dan Pengelolaan Pengaduan LH	480	OK	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah SDM Aparatur ditingkatkan kapasitas dan pengetahuannya dalam tata cara penyelesaian sengketa LH	225	Ok	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani	4	sengketa lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan
	Pengawasan Izin lingkungan dan Izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang diawasi	85	usaha dan/atau kegiatan yang	10	15	15	100	20	45	52.94	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan lingkungan hidup	50	OK (PPLH dan Calon PPLH)	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Penegakan hukum lingkungan hidup	Peningkatan Kapasitas dan Penanganan dalam penegakan hukum lingkungan hidup	6	Kegiatan	1	0	0	0	0	1	16.67	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan kapasitas dan kinerja laboratorium	Meningkatnya kapasitas kinerja Laboratorium	50	Orang	20	10	10	100	0	30	60	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan yang terbeli	40	Jenis	8	9	9	100	0	17	42.5	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengadaan sarana dan prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup	Sarana dan prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup	1	paket	1	0	0	0	0	1	100	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2019(TAHUN n-3)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RPKD TAHUN BERJALAN 2022 (TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET RPKD TAHUN 2020 (TAHUN n-2)	REALISASI RPKD TAHUN 2021 (TAHUN n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2022 (THN BERJALAN/n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
	Pengendalian Mutu Hasil Pengujian	Data Alat Terkalibrasi Dan Jumlah Pengujian Yang tervalidasi	176	Alat	0	44	44	100	44	88	50	Dinas Lingkungan Hidup
	Pelaksanaan pengambilan sampel dan Analisa/Pengujian Sampel	Jumlah Dokumen data hasil uji lingkungan	5	Dokumen	1	1	1	100	1	3	60	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan PERGUB tentang pendapatan daerah bukan pajak dari kegiatan labolatorium	PERGUB tentang pendapatan daerah bukan pajak dari kegiatan labolatorium yang tersusun	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Sosialisasi Jasa Pelayanan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan	Jumlah Aparatur, SDM dan Stakeholder yang mengikuti Sosialisasi Jasa Pelayanan Laboratorium	200	OK	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Inventarisasi usaha/kegiatan Amdal, UKL-UPL, DPLH dan DELH	Jumlah Dokumen Laporan Data inventarisasi yang dihasilkan	5	Dokumen	1	1	1	100	0	2	40.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai Amdal Daerah	Jumlah Komisi Penilai Amdal yang terbina	25	Komisi Penilai	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Anggota Komisi Yang terbina	35	OK	35	35	35	100	0	35	100	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Komisi Penilai Amdal yang dimonitoring dan dievaluasi	10	Komisi Penilai Amdal	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Bimbingan Teknis Tata Laksana Penilaian Amdal dan Izin Lingkungan	Jumlah KPA yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penilaian Amdal dan Izin Lingkungan	280	OK	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Bimbingan teknis Evaluasi Laporan RKL-RPL	Jumlah KPA dan pemrakarsa usaha/ kegiatan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Evaluasi Laporan RKL-RPL	60	OK	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemantauan RKL-RPL di Daerah	Jumlah Dokumen Pemantauan RKL-RPL di	4	Dok	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan Pergub Pengelolaan Limbah B3 Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Pergub Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan	3	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemantauan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Limbah B3	Data hasil pemantauan limbah B3	4	Dok	0	1	1	100	1	2	50	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2019(TAHUN n-3)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RPKD TAHUN BERJALAN 2022 (TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RPKD TAHUN 2020 (TAHUN n-2)	REALISASI RPKD TAHUN 2021 (TAHUN n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2022 (THN BERJALAN/n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	Inventarisasi, pemantauan, dan evaluasi izin pengelolaan limbah B3	Jumlah Dokumen Inventarisasi, pemantauan, dan evaluasi izin pengelolaan limbah B3	4 Dok	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Bimbingan teknis pengelolaan Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan/masyarakat/pegawai yang meningkatkan pengetahuannya dalam pengelolaan Limbah B3	120 OK	0	30	30	100	0	30	25	Dinas Lingkungan Hidup
	Rata rata capaian kinerja						100			82.27	
	Predikat Kinerja						ST			S	
15	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen RPPLH Provinsi									
	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah papan Informasi Lingkungan yang terpasang	400 Unit	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan
		Jumlah sistem informasi lingkungan	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan
	Penyusunan PDRB Hijau	Jumlah Dokumen PDRB Hijau Sulawesi Barat yang dihasilkan	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan Dokumen SLHD dan IKLH Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen SLHD dan IKLH yang dihasilkan	2 Dokumen	2	0	0	0	0	2	100	Dinas Lingkungan
	Penyusunan DIKPLHD (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) dan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Provinsi	Jumlah Dokumen DIKPLHD dan IKLH yang dihasilkan	10 Dokumen	2	2	2	100	2	6	60	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan KLHS	Jumlah Dokumen KLHS Yang dihasilkan	1 dokumen	1	0	0	0	0	1	100	Dinas Lingkungan
	Evaluasi Penyusunan KLHS	Pelaksanaan Evaluasi Dokumen KLHS	4 Dokumen	0	1	1	100	1	2	50	
	Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan LH (NSDA dan LH)	Jumlah dokumen NSDA dan LH	2 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan
	Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen RPPLH	5 dokumen	1	2	2	100	1	4	80	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Frekuensi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan	3 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan PPLH	10 Dokumen	1	1	1	0	1	3	30	Dinas Lingkungan
	Rata rata capaian kinerja						100			70	
	Predikat Kinerja						ST			R	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2019(TAHUN n-3)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RPKD TAHUN BERJALAN 2022 (TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET RPKD TAHUN 2020 (TAHUN n-2)	REALISASI RPKD TAHUN 2021 (TAHUN n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2022 (THN BERJALAN/n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2021(%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
17	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Peningkatan Indeks Kualitas Udara										
		Tersedianya Ruang Terbuka Hijau										
	Penataan Ruang Terbuka Hijau dan Pemeliharaan (RTH)	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau	10	Lokasi	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah titik RTH yang terpelihara	7	Titik	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan RTH	4	kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Rata rata capaian kinerja							0%			0%	
	Predikat Kinerja							SR			SR	
	TOTAL											

Mengetahui,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

A. ACO TAKDIR, S.Sos.M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670702 199103 1 011

keterangan ; skala Nilai Peringkat Kinerja
91 % < 100 % Sangat Tinggi
76 % < 90 % Tinggi
66 % < 75 % Sedang
51 % < 65 % Rendah
< 50 % Sangat Rendah

Disusun,
Mamuju, Februari 2022
KASUBAG PROGRAM & KEUANGAN DLH
PROVINSI SULAWESI BARAT

Hj. ST. FATIMAH B., SE, MM
Pangkat : Pembina
Nip : 19761128 200212 2 007

2.3 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis OPD. Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan tersebut dapat diberikan gambaran pencapaian kinerja pelayanan tahun 2017 – 2021. Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dilihat dari capaian kinerja pada Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Barat yang dihitung melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari 3 sektor, yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan, adanya penurunan indeks kualitas lingkungan hidup setiap tahun dipengaruhi oleh indeks kualitas air dan tutupan lahan. Berikut Capaian Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan pada Tabel 2.3, 2.4 dan 2.5 Tahun 2017 – 2021.

Tabel 2.3
Indeks Kualitas Air Sulawesi Barat

Provinsi/Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Majene	N/AA	70,00	N/AA	N/AA	61,43
Kab. Polewali Mandar	59,33	33,33	46,67	50,00	52,35
Kab. Mamasa	53,43	67,14	47,14	51,82	54,76
Kab. Mamuju	N/A	N/AA	50,00	N/A	63,33
Kab. Pasangkayu	33,67	55,56	47,50	N/A	55,33
Kab. Mamuju Tengah	N/A	N/A	50,00	N/A	67,50
Prov. Sulawesi Barat	54,11	52,01	53,20	53,00	56,04

Tabel 2.4
Indeks Kualitas Udara Sulawesi Barat

Provinsi/Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Majene	98,92	81,91	84,14	86,87	88,16
Kab. Polewali Mandar	99,33	88,66	87,68	85,51	88,56
Kab. Mamasa	99,61	87,32	92,63	91,48	92,80
Kab. Mamuju	99,57	92,29	92,11	92,88	92,96
Kab. Pasangkayu	99,64	94,53	94,96	92,94	94,24
Kab. Mamuju Tengah	99,64	90,83	88,48	88,62	89,13
Prov. Sulawesi Barat	99,45	89,26	90,00	89,72	90,97

Tabel 2.7
Indeks Tutupan Lahan Sulawesi Barat

Provinsi/Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
Majene	52,48	51,60	51,52	58,90	64,04
Polewali Mandar	40,94	39,37	37,25	40,77	44,41
Mamasa	68,48	66,76	68,20	70,50	74,32
Mamuju	70,27	73,66	73,62	82,61	83,25
Pasangkayu	62,50	62,21	62,53	63,17	65,39
Mamuju Tengah	82,23	79,41	79,38	80,13	81,05
Prov. Sulawesi Barat	62,82	62,17	62,08	70,52	72,66

2.4 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Untuk mencapai penyelenggaraan lingkungan strategis agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi dan meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Dalam menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD maka dilakukan pemetaan permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (Tabel 2.8).

Tabel 2.8. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	MASIH RENDAHNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Tingginya degradasi Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Pencemaran Air Sungai - Pencemaran Udara - Pencemaran Air Laut - Semakin luasnya Kerusakan lahan dan terjadinya Abrasi akibat kerusakan mangrove di wilayah pesisir - Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan
2		Tingginya pencemaran lingkungan akibat Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis.	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah - Banyaknya Limbah B3 yang belum Terkelola Dengan baik - Belum maksimalnya pengelolaan sampah dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memadai

3		Belum efektifnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang mempunyai kewenangan khusus dalam pengawasan dan penegakan hukum. - Kurangnya pembinaan dan Pengawasan terhadap Masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
4		Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya pengembangan Generasi Lingkungan - Belum maksimalnya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah
5		Pengelolaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup belum maksimal	<ul style="list-style-type: none"> - Belum meratanya kemampuan teknis/kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing. - Belum Maksimalnya akuntabilitas Data dan Informasi melalui Website sebagai media informasi.

Penentuan isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan pemetaan yang dilaksanakan, sebagai berikut :

1. Permasalahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat 16.787,18 kilometer persegi dengan luas wilayah laut sebesar 20.342 kilometer persegi. Panjang garis pantai barat memanjang dari utara ke selatan sepanjang 677 kilometer dengan jumlah pulau sebanyak 40 pulau. Dari 6 wilayah kabupaten di Sulawesi Barat, 5 diantaranya berada di daerah pesisir pantai. Kondisi tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pola pemukiman di Sulawesi Barat yang sebagian besar berada di wilayah pesisir secara tidak langsung berpengaruh terhadap ekosistem di sekitarnya. Kebijakan pembangunan di lain pihak memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, namun di sisi lain berdampak terhadap

degradasi lingkungan. Seperti diketahui, kota Mamuju sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat dalam proses pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur dilakukan dengan cara reklamasi pantai. Pada kondisi lain, sebagian nelayan tangkap dalam melakukan penangkapan ikan masih banyak yang menggunakan bom. Kondisi ini berpengaruh terhadap kondisi terumbu karang di perairan Sulawesi Barat.

Gambar 3.1 : Aktivitas pengeboman ikan di wilayah Sulawesi Barat



Sumber : Dari berbagai sumber

Potensi dan sumber daya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Barat sangat potensial untuk dikembangkan, baik dari segi peningkatan perekonomian maupun untuk pengembangan pariwisata. Namun jika tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan dampak yang negatif. Perilaku dan pola hidup masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memperhatikan kearifan lokal dalam mengelolah lingkungannya akan berdampak terhadap rusaknya ekosistem.

Tabel 3.3 : Kondisi Hutan Mangrove di Sulawesi Barat Tahun 2021

No.	Kabupaten	Kondisi Hutan Mangrove (Ha)			
		Jarang	Lebat	Sedang	Total
1	Mamuju	130,36	778,16	16,02	924,52
2	Majene	45,98	87,31	10,51	143,80
3	Polewali Mandar	95,99	181,25	2,65	279,88
4	Pasangkayu	33,78	564,51	4,41	602,70
5	Mamuju Tengah	107,15	649,58	24,32	781,04
Jumlah		412,25	2260,79	57,91	2731,95

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

Berdasarkan data diatas, kondisi hutan mangrove di Sulawesi Barat terancam mengalami kerusakan. Total hutan mangrove yang mengalami kerusakan sebesar 184,08 ribu ha atau mencapai 26,61 persen dan dalam kondisi sedang sebesar 286,84 ribu ha atau sebesar 41,48 persen sedangkan kondisi baik hanya sebesar 220,63 ribu ha mencapai 31,90 persen. Jika total 41,48 persen hutan mangrove dalam kondisi sedang tidak dijaga kelestariannya, maka tidak menutup kemungkinan akan mengalami kerusakan.

Potensi kekayaan sumber daya alam perairan di Sulawesi Barat jika dikembangkan akan memberikan kontribusi yang cukup besar. Sebagai contoh misalnya, jika potensi terumbu karang dikembangkan dan dipelihara akan menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup menarik di Provinsi Sulawesi Barat. Namun pada kenyataannya, luas terumbu karang di Sulawesi Barat jika dibandingkan dengan luas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat kurang. Berdasarkan data yang di himpun dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, luas terumbu karang di Sulawesi Barat yang tersebar di 5 kabupaten hanya mencapai 9.719,96 hektar dari total luas perairan yang mencapai 20.342 kilometer persegi.

Untuk lebih jelasnya, kondisi terumbu karang di Sulawesi Barat dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 3.4 : Kondisi Terumbu Karang di Sulawesi Barat

No.	Kabupaten	Kondisi Terumbu Karang (Ha)				
		Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang	Luas Total
1	Mamuju	600,00	1.066,00	1.934,00	3.600,00	7.735,00
2	Majene	0	0	120,58	287,95	408,53
3	Polewali Mandar	0	477,48	0	371,75	849,23
4	Pasangkayu	200,07	346,23	250,48	287,95	1.084,73
5	Mamuju Tengah	0	0	36,00	15,00	51,00
Jumlah		800,07	1,889,71	2.220,48	4.274,70	9.719,96

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa populasi terumbu karang di wilayah Sulawesi Barat pada kondisi sangat baik, baik dan cukup hampir berbanding lurus dengan kondisi kurang. Ini menandakan bahwa potensi kekayaan alam dari terumbu karang di Sulawesi Barat sangat kurang. Jika dilihat secara wilayah, kondisi terumbu karang yang sangat kurang berada di Kabupaten Majene dan Mamuju Tengah. Sedangkan wilayah dengan kondisi terumbu karang yang masih relatif bagus adalah di Kabupaten Pasangkayu.

2. Permasalahan Lahan Kritis, Kerusakan Hutan dan Sumber-Sumber Air.

Kerusakan ekosistem hutan memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kerusakan sumber-sumber air. Kecenderungan ini tampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat tekanan penduduk maupun bencana alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan yang melampaui daya dukung lingkungan itu sendiri. Pembalakan hutan secara liar dan perambahan hutan untuk di konversi menjadi lahan pertanian tidak saja mengakibatkan rusaknya habitat ekosistem namun juga mengakibatkan

menurunnya biodiversitas yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, banjir dan kekeringan, perubahan iklim serta dampak sosial ekonomi, disamping itu dengan rusaknya hutan di daerah hulu mengakibatkan tingginya sedimentasi pada daerah aliran sungai yang menyebabkan pendangkalan sungai serta menurunnya kualitas air sungai.

Lahan kritis dapat didefinisikan sebagai lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan. Fungsi yang dimaksud pada definisi tersebut adalah fungsi produksi dan fungsi tata airnya. Fungsi produksi berkaitan dengan fungsi tanah sebagai sumber unsur hara bagi tumbuhan dan fungsi tata air berkaitan dengan fungsi tanah sebagai tempat berjangkarnya akar dan menyimpan air tanah.

Lahan kritis umumnya terdapat di daerah pegunungan atau di daerah aliran sungai (DAS) bagian hulu, dengan ciri utama antara lain lahan berlereng terjal, tanpa atau sedikit vegetasi penutup tanah, adanya tanda-tanda lahan telah tererosi, dan tanah berwarna merah karena lapisan atasnya telah tererosi.

Lahan kritis di Provinsi Sulawesi Barat jika ditotal baik dalam kawasan hutan maupun bukan kawasan hutan mencapai 682,927,51 hektar atau sekitar 38 persen dari total kawasan hutan dan perairan di Sulawesi Barat. Potensi kerusakan hutan dan lahan kritis secara tidak langsung berpengaruh terhadap ketersediaan sumber-sumber air.

Tabel 3.5. Luas Lahan Kritis pada Kawasan Hutan menurut Kabupaten dan Kekritisan Lahan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (Hektar)

Daerah	Kawasan				
	Tidak Kritis	Potensial	Agak Kritis	Kritis	Sangat
Majene	848,04	3.515,79	41.438,86	5.873,80	0,00
Polewali Mandar	2.895,52	7.459,89	66.974,18	16.914,34	144,38
Mamasa	11.781,11	40.570,77	135.615,07	5.102,30	7.399,22
Mamuju	21.819,37	103.639,93	200.924,90	9.266,29	642,55
Pasangkayu	10.125,55	73.183,77	72.324,18	5.571,59	742,64
Mamuju Tengah	26.390,41	101.576,22	83.686,86	544,17	57,94
Sulawesi Barat	73.860,00	329.946,38	600.964,05	43.272,49	8.986,73

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 3.6. Luas Lahan Kritis pada Luar Kawasan Hutan menurut Kabupaten dan Kekritisan Lahan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (Hektar)

Daerah	Bukan Kawasan				
	Tidak Kritis	Potensial	Agak Kritis	Kritis	Sangat
Majene	3.976,90	6.287,85	25.721,20	1.912,38	30,68
Polewali Mandar	33.659,93	17.255,18	54.354,78	7.897,74	264,46
Mamasa	9.294,99	7.404,28	66.480,91	10.281,38	3.808,74
Mamuju	25.693,50	18.352,14	66.814,94	8.269,24	63,49
Pasangkayu	36.756,90	63.034,45	24.943,75	536,62	538,36
Mamuju Tengah	34.772,37	21.364,34	40.589,34	1.107,95	119,87
Sulawesi Barat	144.154,57	133.698,24	278.904,92	30.005,31	4.825,60

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 2021

Kerusakan ekosistem hutan memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kerusakan sumber-sumber air. Kecenderungan ini tampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat tekanan penduduk maupun bencana alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan yang melampaui daya dukung lingkungan itu sendiri. Pembalakan hutan secara liar dan perambahan hutan untuk konversi menjadi lahan pertanian tidak saja mengakibatkan rusaknya habitat ekosistem namun juga mengakibatkan menurunnya biodiversitas yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, banjir dan kekeringan, perubahan iklim serta dampak sosial ekonomi, disamping itu dengan rusaknya hutan di daerah hulu mengakibatkan tingginya sedimentasi pada daerah aliran sungai yang menyebabkan pendangkalan sungai serta menurunnya kualitas air sungai.

Faktor-faktor penyebab terjadinya banjir dan kekeringan/kebakaran di masing-masing daerah berdasarkan analisis data perubahan penutupan lahan dan iklim disebabkan oleh semakin luasnya lahan kritis akibat pembalakan hutan secara besar-besaran dan pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan, yang berakibat semakin luasnya padang Terjadinya lahan kritis dapat menyebabkan kerusakan fisik, kimia, dan biologi tanah. Perlu adanya upaya dan solusi untuk mengurangi lahan kritis pada masing-masing daerah yaitu melakukan reklamasi dengan membuat tanaman penghijauan, penanaman tanaman semusim, dan pembuatan teras. Potensi kerusakan hutan dan lahan

kritis secara tidak langsung berpengaruh terhadap ketersediaan sumber-sumber air. Salah satu faktor pendukung dalam pencadangan sumber daya air adalah kondisi hutan yang masih bagus. Jika hutan sudah rusak dan mengalami kekritisian, maka cadangan sumber air juga secara otomatis akan mengalami pengurangan.

3. Permasalahan Pencemaran Lingkungan

Sampah kerap kali menimbulkan masalah, menjadi pemicu banjir, pencemaran lingkungan, menyebabkan bau tak sedap, merusak pandangan, dan berbagai macam masalah yang berdampak negatif pada lingkungan hidup. Seperti kita ketahui dan sering kita saksikan dilayar kaca, Beberapa tahun terakhir ini Banjir merupakan salah satu persoalan yang akrab dengan semua Negara di dunia, bahkan yang paling parah, hampir sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan banjir langganan tiap tahun saat datangnya musim penghujan. Adapun pemicu banjir itu selain besarnya curah hujan juga diakibatkan adanya penumpukan sampah di saluran air.

Kejadian seperti diatas juga tidak akan menutup kemungkinan bakal terjadi di daerah tidak terkecuali di Sulawesi Barat. Penumpukan sampah di saluran-saluran air menyebabkan pendangkalan kali, tersumbatnya aliran air (drainase), yang pada akhirnya menimbulkan genangan air yang berpotensi menimbulkan banjir. Selain banjir, dampak yang ditimbulkan dari pola pembuangan sampah sembarangan adalah terjadinya pencemaran air. Di sisi lain, air buangan limbah rumah tangga di Sulawesi Barat khususnya di perkotaan sebagian besar langsung di alirkan ke badan air. Khusus bagi penduduk yang bermukim di sepanjang pinggir sungai, pembuangan tinja langsung dialirkan ke badan air.

Pola hidup masyarakat Sulawesi Barat dalam mengelola sampah masih sangat kurang. Sebagian besar masyarakat menjadikan sungai dan pantai sebagai tempat pembuangan sampah yang paling praktis. Akibatnya terjadi pencemaran air dan menimbulkan banjir pada musim penghujan. Selain sampah-sampah, limbah-limbah rumah tangga lainnya secara umum di Sulawesi Barat

belum ada yang dikelola sebelum di buang ke lingkungan. Fenomena ini bukan hanya menjadi persoalan satu wilayah tetapi sudah menjadi isu pokok di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Gambar 3.2 : Dokumentasi Pencemaran Lingkungan

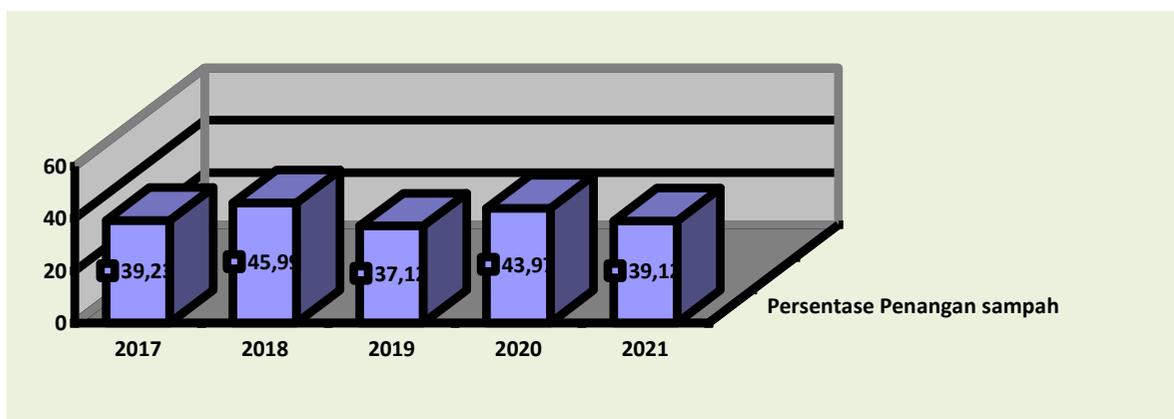


Sumber : Dari berbagai sumber.

Indikator kinerja penanganan sampah di Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2017-2021 telah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase penanganan sampah seiring dengan peningkatan volume produksi sampah setiap tahunnya. Tahun 2017 dan tahun 2018

persentase penanganan sampah tercatat 39,23 persen dan 45,99 Persen, akan tetapi di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 37,12 persen. Namun kemudian di tahun 2020, persentase penanganan sampah mengalami peningkatan menjadi 43,97 persen dan mengalami penurunan kembali menjadi 39,12 persen di tahun 2021. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam grafik di bawah ini.

Gambar 3.3 Persentase Penanganan Sampah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021



Sumber : Dokumentasi Dinas LH Prov. Sulbar Tahun 2022

4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Berupa Pengembangan generasi lingkungan

Generasi muda masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah yang lebih baik, agar dapat ikut serta dalam mengisi pembangunan yang kini sedang berlangsung. Pemuda di Indonesia sangat beraneka ragam dari sabang sampai merauke. Secara umum, ada 3 kategori dalam pengelompokan generasi muda berdasarkan umur dan lembaga serta ruang lingkup tempat pemuda berada yakni: *Siswa*, usia antara 6 – 18 tahun, masih duduk di bangku sekolah, *Mahasiswa*, usia antara 18 – 25 tahun beradi di perguruan tinggi dan akademi dan *Pemuda di luar lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi* yaitu mereka yang berusia 15 – 30 tahun keatas.

Perkembangan pembangunan sekarang ini seringkali mengabaikan aspek lingkungan hidup karena dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat masa kini yang

kurang peduli terhadap lingkungan hidup. Untuk itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan perhatian khusus kepada pengembangan generasi lingkungan. Keberlangsungan hidup di bumi ini adalah tanggung jawab kita semua, termasuk di dalamnya adalah masyarakat; baik usia dewasa ataupun muda yang dikenal dengan generasi muda.

Pengembangan generasi lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat masih belum menjadi kegiatan yang menarik untuk di kembangkan. Program pengembangan sekolah Adiwiyata misalnya, sejak diprogramkan pada tahun 2012 hingga saat ini, minat dari sekolah dan partisipasi dari pemerintah kabupaten masih sangat kurang. Faktor penghambat utama adalah kurangnya kepedulian dari instansi yang menangani pendidikan untuk ikut terlibat dalam program kegiatan ini. Satu-satunya kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang sangat aktif dalam program pengembangan Sekolah Adiwiyata adalah Polewali Mandar.

Selain pengembangan sekolah Adiwiyata, pembinaan kaum muda melalui gerakan peduli lingkungan masih belum maksimal. Minat kaum muda untuk berkumpul bersama dalam kegiatan aksi lingkungan masih sangat kurang. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah perkembangan teknologi yang semakin tak terbatas.

Program Sekolah Adiwiyata merupakan sebuah gerakan bersama yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2006, bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan lingkungan hidup secara dini kepada generasi bangsa dimulai dari bangku pendidikan. Data yang dihimpun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan 2021, jumlah sekolah peraih penghargaan Sekolah Adiwiyata di Provinsi Sulawesi Barat baru mencapai 62 sekolah dengan kategori sekolah Adiwiyata Provinsi, Nasional dan Mandiri.

Tabel 3.7 : Jumlah sekolah peraih penghargaan adiwiyata menurut Kabupaten

No.	Kabupaten	Kategori		
		Provinsi	Nasional	Mandiri
1	Polewali Mandar	23	7	4
2	Majene	13	7	-
3	Pasangayu	5	2	-
4	Mamuju	-	1	-
5	Mamasa	-	-	-
6	Mamuju Tengah	-	-	-
Jumlah		41	17	4

Sumber : Dokumentasi Dinas LH Sulbar 2022

5. Permasalahan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan paksaan sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum lingkungan merupakan penegakan hukum yang cukup rumit karena hukum lingkungan menempati titik silang antara berbagai bidang hukum klasik. Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan mulai dari

Perundang-undangan, Penentuan standar, Pemberian izin, Penerapan dan Penegakan hukum.

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengawasan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan

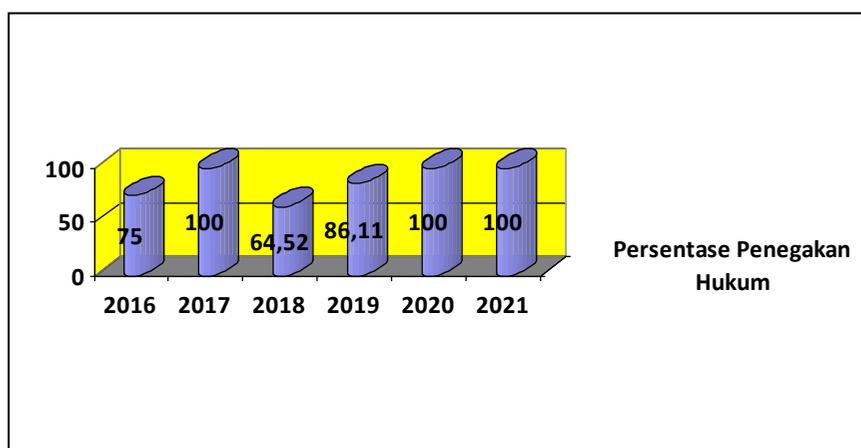
pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pejabat dimaksud adalah Pejabat Fungsional Bidang Lingkungan Hidup yang disebut PPLH.

Salah satu faktor penghambat dalam proses pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di Sulawesi Barat adalah tidak tersedianya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang mempunyai kewenangan khusus dalam pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini tidak berbanding lurus dengan banyaknya kasus lingkungan yang muncul setiap tahunnya. Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah mengedepankan tindakan preventif dengan melakukan pendekatan dalam rangka pembinaan.

Pada tahun 2008, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah membentuk Pos Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Pos P3SLH). Namun sejak terbentuk pos layanan pengaduan ini tidak dapat berjalan maksimal karena tidak didukung oleh sumber daya manusia pengelola yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, pemerintah tetap melakukan penanganan kepada seluruh pengaduan lingkungan yang diterima dengan upaya-upaya pendekatan persuasif.

Dari sekian banyak pengaduan yang telah diterima, hingga saat ini belum ada yang diproses hingga penegakan hukum, baik secara administratif maupun secara pidana atau perdata.

Gambar 3.4 Persentase Penegakan Hukum Lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2021



Sumber : Dokumentasi Dinas LH Prov. Sulbar Tahun 2022

6. Permasalahan Perubahan Iklim

Kondisi ketahanan lingkungan pada era globalisasi pembangunan saat ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan ancaman global warming. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan terlebih lagi Sulawesi Barat yang memiliki indeks resiko bencana yang paling tinggi. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir ditengah tantangan pembangunan yang diharapkan akan semakin meningkat. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. Pemanasan global terjadi sebagai akibat meningkatnya jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer. Naiknya intensitas efek rumah kaca yang

terjadi karena adanya gas dalam atmosfer yang menyerap sinar panas yaitu sinar infra merah yang dipancarkan oleh bumi menjadikan perubahan iklim global. Jika tidak ada upaya yang sistematis dan terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan perbaikan kondisi lingkungan lokal dan global mulai dari sekarang, maka dampak yang ditimbulkan akibat adanya perubahan iklim ke depan akan semakin besar dan lebih lanjut akan berdampak pada sulitnya mencapai sistem pembangunan yang berkelanjutan. Upaya Penanganan masa perubahan iklim dalam konteks pembangunan membutuhkan manajemen perubahan iklim secara efektif, dan pada saat bersamaan mengantisipasi dampak perubahan iklim global jangka panjang secara komprehensif.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi berupa Program Kampung Iklim (Proklam) dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Pembinaan Program kampung iklim atau Proklam dilaksanakan sejak tahun 2016 dengan melibatkan seluruh kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Barat. Untuk lebih jelasnya di gambarkan pada tabel 3.8

Tabel 3.8 Daftar Lokasi Proklam Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 – 2021

No	Nama Lokasi Proklam	Kabupaten	Kategori Proklam	Tahun
1	Desa Adolang Kecamatan Pamboang	Majene	Masih Manual/Belum Link SRN	2016
			Madya	2018
			Utama	2019
2	Lingkungan Mangge, Desa Totoli, Kecamatan Banggae		Pratama	2017

3	Dusun Tinggas Timur, Desa Limbua, Kecamatan Sendana		Madya	2017
4	Dusun Galung Pa'ara Desa Pamboborang Kecamatan Banggae		Madya	2020
5	Lingkungan Lipu, Desa Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur,		Madya	2019
			Utama (Tropy)	2021
6	Lingkungan Polewali	Polman	Madya	2017
7	Lingkungan Olahraga, Kelurahan Wattang, Kec.Polewali		Pratama	2017 dan 2018
			Utama	2021
8	Desa Kaleok Kecamatan Binuang		Utama (Tropy)	2018
			Lestari	2020
9	Kelurahan Sepang Kecamatan Tinambung		Pratama	2018
10	Desa kunyi Kecamatan Anreapi		Utama	2019
11	Desa Kuajang Kecamatan Binuang		Utama (Tropy)	2019
12	Lingkungan Ujung Kelurahan Polewali		Madya	2019
			Utama	2020
13	Dusun Cendana Desa Kaleok Kecamatan Binuang		Utama	2020
14	Dusun Tandipura Desa Kaleok Kecamatan Binuang		Madya	2020
			Utama (Tropy)	2021
15	Dusun Laba-Laba Desa Paku Kecamatan Binuang		Madya	2020
16	Dusun Marende Desa Kaleok Kecamatan Binuang		Madya	2020
17	Dusun Eran Batu Desa Battetangnga Kecamatan Binuang		Madya	2020
18	Dusun Bajoe Desa Rea Kecamatan Binuang		Madya	2020
19	Dusun Kapping Toa Desa Bonra Kecamatan Mapilli		Madya	2020
			Utama	2021
20	Dusun Baruga Desa Battetangnga Kecamatan Binuang		Madya	2020

21	Dusun Tanete Desa Amola Kecamatan Binuang		Madya	2020
22	Dusun Tonyaman Desa Tonyaman Kecamatan Binuang		Madya	2020
23	Dusun Amola Desa Amola Kecamatan Binuang		Madya	2020
24	Dusun Lewukang Desa Tandassura		Utama	2021
25	Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo		Utama	2021
26	Lingkungan Pulele Kelurahan Darma		Utama	2021
27	Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo		Madya	2021
28	Kelurahan Marta Jaya Kecamatan Pasang Kayu	Pasangkayu	Masih Manual/Belum Link SRN	2016
29	Dusun Peburo,Desa Ako,Kecamatan Pasang Kayu		Madya	2017
30	Dusun Muara, Desa Tikke		Binaan(blom ada kelembagaan yang mendukung)	2018
31	Desa Pangiang, Kecamatan Pasang Kayu,		Binaan(blom ada kelembagaan yang mendukung)	2018
32	Dusun Tanga-tanga Desa Pakava Kecamatan Pasangkayu		Madya	2020
33	Dusun Bumi Jaya, Desa Makmur Jaya , Kecamatan Tikke Raya		Madya	2021
34	Desa Makuang Kecamatan Messawa	Mamasa	Madya	2018
			Utama	2019
35	Desa Tondokbakaru Kecamatan Mamasa		Utama	2020
36	Desa Guliling Kecamatan Kalukku	Mamuju	Madya	2018
37	Desa Karampuang Kecamatan Mamuju		Madya	2019
38	Desa Tadui Kecamatan Mamuju		Pratama	2019
39	Desa Sinabatta Kecamatan Topoyo	Mamuju Tengah	Madya	2019
40	Desa Mahahe Kecamatan Tobadak		Utama	2020
41	Desa Bambadaru Kecamatan Tobadak		Madya	2020

Sumber Dinas Lingkungan Hidup 2022

Keenam isu tersebut diatas selanjutnya dijabarkan dalam rencana program kegiatan dan Subkegiatan dalam rangka menjaga agar pembangunan senantiasa berkelanjutan.

2.5 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021

Rancangan awal RKPD Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, dan pada visi RPJPD Sulbar 2005-2025, yaitu kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah dan masyarakat malaqbi. Adapun tema pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pemulihan EKonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Adapun jumlah pagu pada rancangan awal Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp. 30.697.962.012,82,- Setelah penetapan KUA/PPAS anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp. 8.290.048.493 -. Dengan turunnya pagu maka beberapa kegiatan yang terdapat pada rancangan awal Renja yaitu sebanyak 72 Subkegiatan, hanya terdapat 31 Subkegiatan yang masuk dalam Renja Tahun 2021.

2.6 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat sudah dilaksanakan melalui kegiatan forum OPD dan penjaringan program dan kegiatan masyarakat melalui usulan instansi lingkungan hidup kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat. Usulan program dan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan masuk dalam Rencana Kerja Tahun 2021, antara lain : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi, Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 sesuai dengan 5 arahan utama Presiden, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyerdehanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Adapun agenda pembangunan/prioritas Nasional, sebagai berikut :

- Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan.
- Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
- SDM berkualitas dan berdaya saing.
- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar.
- Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mendukung tercapainya prioritas nasional maka Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menyusun arah kebijakan dengan 2 kerangka besar yaitu Mengurangi beban lingkungan; dan Aktualisasi potensi SDH untuk mendukung sumbangan sektor kehutanan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai Kementerian dalam meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Proyeksi/ target IKLH dalam RPJMN untuk Tahun 2023 pada Nilai 69,48 dengan adanya perubahan perhitungan Indikator yaitu penambahan Indeks Kualitas Air Laut.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPD, RPJPD Provinsi Sulawesi Barat dan RKPD, melalui penyusunan rencana pembangunan daerah (RPD, RKPD) yang berkualitas dan pelaksanaan

tugas-tugas lainnya dari Gubernur. Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta sinergi antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (korelasi) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah (RPD dan RKPD) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPD/RKPD/Renstra SKPD), sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Gubernur dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Gubernur. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran pembangunan. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 berpedoman pada RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, RPJPD Sulawesi Barat 2005-2025 dan isu-isu strategis yang penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD. Adapun tema dan prioritas pembangunan Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Dengan 4 Prioritas Pembangunan, yaitu :

- Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah.
- Meningkatkan Pembangunan Manusia yang unggul dan Berbudaya
- Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
- Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa

Tujuan rencana kerja disusun untuk menjabarkan lebih lanjut Tujuan dan Sasaran yang disusun lebih detail, realistis dan dilengkapi oleh indikator yang terukur dan dapat dicapai pada periode yang direncanakan. Tujuan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, yaitu

Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai dalam renja 2023, yaitu : Terpeliharanya Kualitas Air, Terpeliharanya Kualitas Udara Dan Terpeliharanya Kualitas Air Laut.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 berdasarkan pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026. Dokumen RPD merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat. Arah kebijakan yang terdapat dalam dokumen RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, salah satu Prioritas yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Prioritas III Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana, dengan Arah Kebijakan Peningkatan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim. Berdasarkan pada aplikasi SIPD pada RENJA Tahun 2023 terdapat 9 program yang akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan melaksanakan 9 program, sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
4. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan

Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

6. Program Pengelolaan Persampahan
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari 9 program diatas, diturunkan menjadi 18 kegiatan dan 72 sub kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2023. Adapun kegiatan dimaksud antara lain :

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
3. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
4. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
5. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
6. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
7. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
8. Penanganan Sampah di TPA/TPST regional
9. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
10. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
11. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

14. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
15. Administrasi Umum Perangkat Daerah
16. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
17. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
18. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023. Adapun rencana kegiatan dijabarkan dalam Tabel.4.1. Rencana Program Dan Kegiatan Renja OPD Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel.4.1. Rencana Program Dan Kegiatan Renja OPD Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										8,532,188,583		29,261,699,984			
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										6,501,344,316		7,148,088,460		
2	11	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										214,517,900		330,837,159	
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	4 Dokumen	24 Poin	95,945,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	160,837,159
2	11	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	1 Dokumen	24 Poin	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	2,500,000
2	11	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	1 Dokumen	24 Poin	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	2,500,000
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	1 Dokumen	24 Poin	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	2,500,000
2	11	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	1 Dokumen	24 Poin	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	2,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	11	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	2 Laporan	24 Poin	64,618,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	75,000,000
2	11	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	4 Laporan	24 Poin	43,954,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	85,000,000
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5,069,557,583			5,046,813,211				
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	51 Orang/ Bulan	75 Persen	5,032,188,583	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	4,986,310,916
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	1 Laporan	75 Persen	37,369,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	60,502,295
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					231,750,000			275,750,000				
2	11	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	82 Paket	95 Persen	51,750,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	51,750,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	12 Orang	95 Persen	160,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	200,000,000
2	11	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	51 Orang	95 Persen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	24,000,000
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							467,178,093					522,560,945
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	10 Paket	75 Persen	26,457,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	26,897,000
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	2 Paket	75 Persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	2,770,900
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	1 Dokumen	75 Persen	8,066,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	8,066,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	36 Paket	75 Persen	34,955,735	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	38,000,000
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	40 Laporan	75 Persen	394,699,358	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	446,827,045
2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					36,767,640			211,317,145				
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	3 Paket	80 Persen	10,565,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	63,000,000
2	11	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	3 Unit	80 Persen	13,329,960	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	89,768,245
2	11	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	3 Unit	80 Persen	12,872,280	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	58,548,900
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					270,000,000			205,000,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	10 Laporan	90 Persen	87,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	87,500,000
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	36 Laporan	90 Persen	182,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	117,500,000
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							211,573,100			555,810,000		
2	11	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	6 Unit	80 Persen	121,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	226,000,000
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	4 Unit	80 Persen	11,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	24,640,000
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	1 Unit	80 Persen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	220,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	5 Unit	80 Persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	54,170,000
2	11 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	6 Unit	80 Persen	33,023,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	65 Poin 64,5 Poin 75 Persen 75 Persen	31,000,000
2	11 02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP								435,500,000				471,971,009
2	11 02 1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi								35,500,000				200,000,000
2	11 02 1.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Cakupan dokumen Pengendalian RPPLH yang tersusun	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	35,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100 Persen	200,000,000
2	11 02 1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi								400,000,000				271,971,009
2	11 02 1.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS yang dikaji Provinsi	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100 Persen	271,971,009
2	11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								972,066,429				19,638,626,459
2	11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								646,956,429				17,828,276,995
2	11 03 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase Ketaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	1 Dokumen		92,939,529	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan Hidup	75 Persen	15,678,276,995
2	11 03 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase Ketaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	2 Dokumen		144,016,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan Hidup	75 Persen	350,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Persentase Ketaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan Hidup	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	3 Dokumen		410,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan Hidup	75 Persen	1,800,000,000
2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								325,110,000					1,810,349,464
2.11.03.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Persentase Ketaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Cakupan wilayah yang direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	3 Dokumen	20 Ha	325,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan Hidup	75 Persen	1,810,349,464
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								110,000,000					990,087,366
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								110,000,000					990,087,366
2.11.05.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Limbah	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah titik pengumpulan limbah B3	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,763 Persen	1 Dokumen	8 Titik	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Limbah	4,763 Persen	100,000,000
2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Limbah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Jumlah titik pengumpulan limbah B3	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,763 Persen	1 Dokumen	8 Titik	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Limbah	4,763 Persen	890,087,366
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								78,500,000					176,989,128
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi								78,500,000					176,989,128
2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase Ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Jumlah Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang dilaksanakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,71 Persen	0 Dokumen	15 Usaha/Kegiatan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	35,71 Persen	76,989,128

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2	11 06 1.01 02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Jumlah Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang dilaksanakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,71 Persen	3 Orang	15 Usaha/Kegiatan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	35,71 Persen	0	
2	11 06 1.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang dilaksanakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,71 Persen	10 Laporan	15 Usaha/Kegiatan	48,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	35,71 Persen	100,000,000	
2	11 06 1.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Persentase Ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang dilaksanakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,71 Persen	0 Dokumen	15 Usaha/Kegiatan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	35,71 Persen	0	
2	11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								113,333,373						102,260,385
2	11 08 1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi								113,333,373						102,260,385
2	11 08 1.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	Jumlah Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan Pilot Project	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Persen	2 Lembaga	2 Lembaga	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan	2 Persen	52,260,385	
2	11 08 1.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan Pilot Project	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Persen	1 Dokumen	2 Lembaga	43,333,373	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan	2 Persen	50,000,000	
2	11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								60,444,465					51,130,193	
2	11 09 1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi								60,444,465					51,130,193	
2	11 09 1.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Kabupaten Penerima Penghargaan ADIPURA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Persen	2 Entitas	1 Kabupaten	60,444,465	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	17 Persen	51,130,193	
2	11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								46,000,000					88,494,564	
2	11 10 1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi								46,000,000					88,494,564	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	11	10	1.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Jumlah Pengaduan yang tertangani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	5 Pengaduan	46,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 Persen	88,494,564
2	11	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Pengaduan yang tertangani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Dokumen	5 Pengaduan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 Persen	0
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					215,000,000				594,052,420				
2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional					215,000,000				594,052,420				
2	11	11	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,131 Persen	1 Dokumen		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Persampahan	0,131 Persen	400,000,000
2	11	11	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,131 Persen	1 Dokumen		165,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Persampahan	0,131 Persen	194,052,420
TOTAL										8,532,188,583								29,261,699,984

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, isu-isu strategis dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 serta RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023. Adapun arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2023 adalah “Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat ini adalah sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 dan sebagai bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan menjadi acuan dan arahan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023.